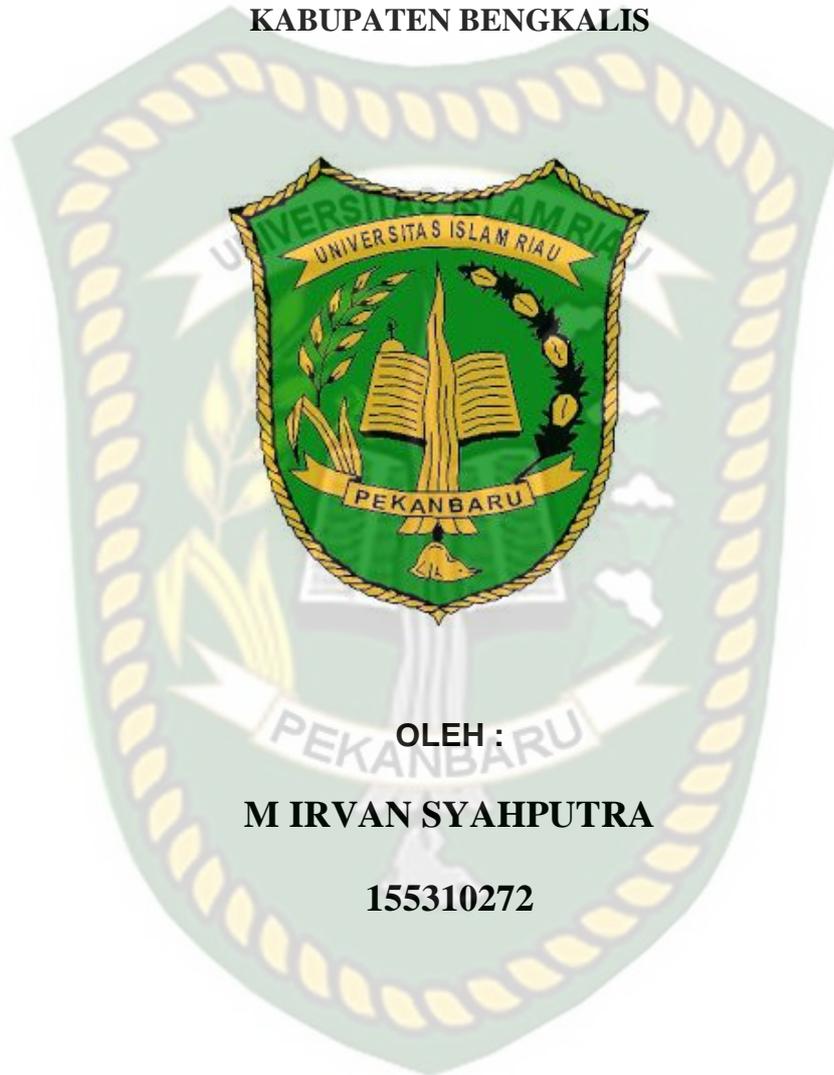


SKRIPSI

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, AKSESIBILITAS
LAPORAN KEUANGAN, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI
KABUPATEN BENGKALIS**



OLEH :

M IRVAN SYAHPUTRA

155310272

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI

TAHUN 2019



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Alamat: Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Marpoyan
Telp. (0761) 674681 Fax. (0761) 674834 Pekanbaru-28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : M IRVAN SYAHPUTRA
NPM : 155310272
JURUSAN : AKUNTANSI
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN,
AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN, DAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA DI KAB. BENGKALIS

Disahkan Oleh :
PEMBIMBING

Dra. Eny Wahyuningsih, SE.,M.Si.,Ak,Ca

Mengetahui :

DEKAN

Drs. Abrar, M.Si.,Ak,Ca

KETUA PRODI AKUNTANSI

Dra. Eny Wahyuningsih, SE.,M.Si.,Ak,Ca

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN AKSESIBILITAS
LAPORAN KEUANGAN DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI
KAB. BENGKALIS**

M IRVAN SYAHPUTRA
155310272

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bengkalis. Populasi penelitian adalah Kantor desa yang tersebar di wilayah Kabupaten Bengkalis dengan metode pengumpulan data *survey* melalui penyebaran kuesioner. Jumlah sampel adalah 36 responden yang diambil berdasarkan *Insidental sampling*. Metode analisis data adalah regresi berganda. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Kata Kunci: Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, Sistem Pengendalian Internal, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KAB. BENGKALIS”. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan studi jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Kedua Orang tua yang telah memberikan doa dan dukungan selama proses pembuatan skripsi
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL Selaku Rektor Universitas Islam Riau
3. Bapak Drs. H. Abrar, M.Si, Ak, CA Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang sekaligus sebagai Pembimbing Akademik (PA).
4. Ibuk Dra. Eny Wahyuningsih, M. Si., Ak., CA Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi.

5. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
6. Seluruh responden yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktu dalam pengisian kuesioner.
7. Teman-teman seperjuangan Junaidi, Sapriadi, Fahmi, Ravi Dll yang tidak disebutkan yang telah memberikan dukungan serta doa.

Penulis menyadari tidak ada yang sempurna di dunia ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, begitu pula dengan skripsi ini yang pasti memerlukan kritik dan saran perbaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Pekanbaru, 9 oktober 2019

M irvan Syahputra

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	9
A. Telaah Pustaka	9
1. Pemerintahan Desa	9
2. Penyajian Laporan Keuangan	11
3. Aksesibilitas Laporan Keuangan	16
4. Sistem Pengendalian Internal.....	17
5. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	20
6. Hubungan antar Variabel	25
7. Penelitian Terdahulu	29
8. Model Penelitian	31
B. Hipotesis.....	32

BAB III : METODE PENELITIAN	33
A. Lokasi dan Objek Penelitian	33
B. Operasional Variabel Penelitian.....	33
C. Populasi dan Sampel	36
D. Jenis dan Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data.....	37
G. Uji Kualitas Data.....	38
1. Uji Validitas Data.....	38
2. Uji Reliabilitas	38
H. Uji Asumsi Klasik	39
1. Uji Normalitas.....	39
2. Uji Multikolinearitas	39
3. Uji Heterokedastisitas	40
I. Uji Hipotesis.....	41
1. Uji Parsial(Uji t).....	41
2. Uji Simultan (Uji F)	41
J. Koefisien Determinan(R^2).....	42
BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	43
A. Sejarah Singkat Kabupaten Bengkalis	43
B. Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis.....	43
C. Daftar Desa Kabupaten Bengkalis	44
D. Struktur Organisasi desa Kabupaten Bengkalis	47

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Deskripsi Responden.....	48
B. Statistik Deskriptif	50
C. Uji Kualitas Data.....	51
1. Uji Validitas	51
2. Uji Reliabilitas	55
D. Uji Asumsi Klasik.....	57
1. Uji Normalitas.....	57
2. Uji Multikolinearitas	58
3. Uji Heterokedastisitas	59
E. Teknik Analisis Data.....	60
F. Pengujian Hipotesis.....	62
1. Uji Parsial (Uji t).....	62
2. Uji Simultan (Uji F)	64
G. Koefisien Determinasi (R^2).....	66
H. Pembahasan Hasil Penelitian	67
BAB VI : PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	29
Tabel 4.1 Daftar Desa.....	44
Tabel 5.1 Jumlah Responden.....	48
Tabel 5.2 Deskriptif Responden.....	49
Tabel 5.3 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	50
Tabel 5.4 Hasil Uji Validitas Variabel (X1).....	52
Tabel 5.5 Hasil Uji Validitas Variabel (X2).....	53
Tabel 5.6 Hasil Uji Validitas Variabel (X3)	54
Tabel 5.7 Hasil Uji Validitas Variabel (Y).....	55
Tabel 5.8 Hasil Uji Reliabilitas	56
Tabel 5.9 Uji Normalitas <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	57
Tabel 5.10 <i>Coefficients</i>	59
Tabel 5.11 <i>Coefficients</i>	61
Tabel 5.12 <i>Coefficients</i>	63
Tabel 5.13 <i>Annova</i>	65
Tabel 5.14 Hasil Pengujian Hipotesis	65
Tabel 5.15 <i>Model Summary</i>	66

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Model Penelitian.....	31
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	47
Gambar 5.1 Normalitas P Plot.....	58
Gambar 5.2 <i>Scatterplot</i>	60



Daftar Lampiran

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

Lampiran 2 Tabulasi Data

Lampiran 3 Uji Validitas dan Reliabilitas

Lampiran 4 Regresi Linear





Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teori pemerintahan modern mengajarkan bahwa untuk mewujudkan *good governance* perlu dijalankan desentralisasi pemerintahan agar pemerintahan akan semakin dekat dengan rakyat. Pemerintahan yang dekat dengan rakyat berdampak pada pelayanan yang diberikan menjadi lebih cepat, hemat, murah, responsif, inovatif, akomodatif dan produktif. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menuntut pemerintah daerah untuk melaksanakan desentralisasi dan memacu pertumbuhan ekonomi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di mana tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola secara mandiri dana desa dan mengembangkan potensinya guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan

keuangan desa tidak terlepas dari akuntabilitas. Secara umum akuntabilitas dikatakan sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik (Mustofa, 2012). Akuntabilitas dalam pemerintah desa sangat penting karena merupakan salah satu bentuk media pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai entitas yang mengelola dana desa.

Permendagri 113 Tahun 2014 menjelaskan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Asas pengelolaan keuangan desa sebagai berikut: (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. (2) Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 pasal 86 menyatakan bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sistem informasi desa yang dimaksud yaitu fasilitas perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, serta jaringan yang berisi informasi berkaitan dengan pembangunan desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa merupakan proses pengelolaan keuangan desa yang di mulai dari perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar di laporkan dan di

pertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya (Halim,2007). Salah satu syarat untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi penyajian laporan keuangan, yakni pemerintahan desa harus mampu menyediakan semua informasi keuangan yang relevan secara lengkap dan terbuka kepada publik, penyajian laporan keuangan yang lengkap dan secara langsung tersedia bagi pengguna informasi menentukan sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan desa tersebut. dilihat dari hal penyajian laporan keuangan di beberapa desa kabupaten bengkalis ternyata masih banyak terjadi dimana pemerintahan desa belum benar benar melakukannya dengan sempurna dimana terjadi *disclaimer* dan hal yang tidak wajar. Ini sejalan dengan hasil penelitian Wardana Ibnu (2016), yang menyatakan penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, hehanussa (2015) menyatakan penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. sedangkan Riyansa, dkk (2015) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas.

Variabel aksesibilitas laporan keuangan juga merupakan faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam penelitian sebelumnya. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan. Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami (Mulyana,2006). Namun kenyatannya publikasi laporan

keuangan oleh pemerintah desa (melalui surat kabat, internet dll) nampaknya belum dilakukan sepenuhnya, masih banyak desa di kabupaten bengkalis dimana laporan keuangannya tidak mudah untuk diakses oleh masyarakat sehingga dapat menurunkan kualitas transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Hasil penelitian Nitasari (2018) menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Yusrianti, dkk (2013) menyatakan bahwa pengungkapan laporan neraca daerah dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian Randi Tengku Muhammad (2018) menyatakan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Variabel sistem pengendalian internal juga merupakan faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sistem pengendalian internal adalah suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya organisasi dan berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan. Akuntabilitas laporan keuangan tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya pengawasan. Pengendalian internal berada di bawah kendali eksekutif dan dilakukan untuk memastikan strategi dijalankan dengan baik sehingga tujuan dapat dicapai. Namun kenyataannya masih ada desa yang sistem pengendaliannya masih tergolong lemah. Sebagai akibatnya penyajian laporan keuangan desa yang tidak lengkap dan tidak aksibel menurunkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah positif signifikan

menurut Wardana Ibnu (2016), serta Aramide dan Bashir (2015) menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Sedangkan Indriya (2013) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Fenomena yang terjadi penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi yang me-*Warning* ada 14 potensi permasalahan dana Desa yang ditemukan pada empat aspek, yakni aspek regulasi dan kelembagaan, aspek tatalaksana, aspek pengawasan, dan aspek sumberdaya manusia. Beberapa Desa di Kabupaten Bengkalis juga tidak pernah menginformasikan suatu bentuk laporan pertanggungjawaban atas kinerja mereka kepada masyarakat, Sehingga masyarakat tidak mengetahui apa-apa saja yang menjadi program kerja desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Contoh lain dari peristiwa ini menimbulkan adanya tindak pidana korupsi di desa semunai bengkalis dimana alokasi dana desa sebesar (Satu) milyar rupiah diselewengkan oleh kades yang merugikan negara sebesar 300 juta rupiah *Sumber* (Riauterkini.com, riau.antaranews.com). Permasalahan ini membuktikan bahwa dana Desa yang telah dialokasikan, peruntukkan dan penggunaannya tidak seluruhnya untuk membiayai program-program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Akibatnya berimplikasi terhadap belum terpenuhinya maksud pemerintah pusat dan harapan masyarakat Desa agar infrastruktur Desa lebih tersedia dan berpengaruh Terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian terdahulu di atas masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten antara penyajian laporan keuangan aksesibilitas laporan keuangan dan

sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Atas dasar hal tersebut penulis tertarik meneliti pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, serta sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini masih tergolong baru karena obyek dari penelitian ini adalah desa. Oleh karena itu hanya beberapa penelitian terdahulu yang berjudul sama mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan pada desa yaitu penelitian Ibnu Wardana (2016) dan Tengku Muhammad (2018). Kebanyakan penelitian yang berjudul sama namun objeknya adalah operasi perangkat daerah (OPD).

Berdasarkan uraian latar belakang, fenomena, dan sedikit perbedaan hasil yang diperoleh dari penelitian sebelumnya maka penulis tertarik membuat penelitian dengan judul **Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Bengkalis.**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?
2. Apakah terdapat pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?
3. Apakah terdapat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa
- b. Untuk mengetahui aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa
- c. Untuk mengetahui sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman praktis bagi peneliti dalam menerapkan teori yang telah didapat selama dibangku perkuliahan

b. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi pengetahuan dan diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangannya.

c. Bagi Akademisi

Memberikan referensi bagi akademisi maupun pihak lain sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dan menambah wawasan mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan

dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada desa.

D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi 6 bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini menjelaskan telaah pustaka yang berhubungan dengan penulisan dan hipotesis serta mengemukakan konsep operasional penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab ini dijelaskan tentang lokasi penelitian operasional variable penelitian, populasi, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Dalam Bab ini dikemukakan tentang gambaran umum Kantor Desa Di Kabupaten Bengkalis

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas dan menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini mencakup kesimpulan, dan kemudian diberikan beberapa saran yang bermanfaat bagi Kantor Desa maupun bagi penulis.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. Telaah Pustaka

1. Pemerintahan desa

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa, Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 18). Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa. Permendagri 113 menyatakan bahwa dalam siklus pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab dan tugas dari kepala desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa).

a. Kepala Desa

Kepala desa adalah Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa

dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa memiliki kewenangan yaitu: Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa, dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris desa selaku koordinator PTPKD membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas: menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa (SPP). Sekretaris desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dan bertanggungjawab kepada kepala desa.

c. Kepala Seksi

Kepala seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai PP Nomor 47 Tahun 2015 pasal 64 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi.

Kepala seksi mempunyai tugas: Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam buku pembantu kas kegiatan. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

d. Bendahara Desa

Bendahara desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa. Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

2. Penyajian Laporan Keuangan

IAI-KASP (2015) menjelaskan bahwa membuat laporan keuangan merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Data laporan keuangan diambil dari

seluruh proses yang dilakukan sampai dengan dibuatnya neraca lajur. Data yang diproses berdasarkan neraca lajur itulah digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. BPKP (2015) menyatakan laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah desa antara lain :

a. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat, terdiri dari:

1. Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan.
2. Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama menggambarkanrealisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester I dibandingkan dengan target dan anggarannya, sedangkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir tahun menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran.

b. Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam bentuk peraturan

desa, maka peraturan desa ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana tercantum dalam pada pasal 41 Permendagri 113/2014, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan.

c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa dilakukan:

1. Untuk semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
2. Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan laporan dana desa dari desa-desa yang ada di wilayah kabupaten/kota, Bupati/Walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa kepada Menteri keuangan dengan tembusan Menteri yang menangani desa, Menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait, dan Gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

d. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan

APBDesa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk peraturan desa.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:

1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan
2. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan
3. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa

Laporan ini disampaikan kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran (PP 43/2014 pasal 51). Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjelaskan tentang karakteristik laporan keuangan yaitu ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Terdapat 4 indikator yang digunakan untuk mengukur penyajian laporan keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 yaitu (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, (4) dapat dipahami.

1. Relevan \Rightarrow Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

Informasi yang relevan adalah :

- a. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang

akan datang dengan mengacu pada hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

- b. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi di masa lalu.

- c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

- d. Lengkap

Informasi disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

2. Andal \Rightarrow Informasi dalam laporan keuangan harus andal bebas dari pengertian yang menyesatkan, menyajikan fakta secara jujur, dan dapat diverifikasi.

Informasi yang andal setidaknya memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. Dapat diverifikasi

Informasi dalam laporan keuangan dapat diuji. Akan lebih baik apabila dilakukan pengujian lebih dari satu kali oleh pihak yang berbeda dan hasilnya tidak jauh beda.

- b. Penyajian jujur

Informasi menggambarkan secara jujur transaksi yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

- c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kepentingan umum dan tidak mementingkan kepentingan pihak tertentu

3. Dapat dibandingkan \Rightarrow Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal.
4. Dapat dipahami \Rightarrow Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

3. Aksesibilitas Laporan Keuangan

Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas bukan disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial (Jones *et al*, 1985). Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan kepada publik dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Menurut Nurmuthmainnah (2015) terdapat 3 indikator yang digunakan untuk mengukur aksesibilitas adalah kemudahan masyarakat mendapatkan informasi (1) terbuka dimedia massa, (2) mudah diakses, (3) ketersediaan informasi). Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami. Akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan website (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. Pada dasarnya masyarakat mempunyai hak dasar atas pemerintah yaitu salah satunya hak untuk diberi

informasi yang meliputi hak untuk di beri penjelasan secara terbuka atas permasalahan tertentu. Aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan. Menurut Permendagri 113 laporan keuangan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi atau pelaksanaan APBDes wajib diinformasikan secara tertulis kepada masyarakat dengan menggunakan media yang mudah diakses masyarakat.

4. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian intern pemerintah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mendefinisikan sistem pengendalian internal pemerintah ialah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut PP 60 Tahun 2008 Terdapat 5 indikator yang digunakan untuk mengukur sistem pengendalian meliputi: (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi dan, (5) pemantauan.

a. Lingkungan pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya melalui:

1. Penegakan integritas dan nilai etika.
2. Komitmen terhadap kompetensi.
3. Kepemimpinan yang kondusif.
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.
8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
9. Penilaian risiko

b. Penilaian Risiko

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko terdiri atas: identifikasi risiko dan analisis risiko, pimpinan instansi pemerintah menetapkan penilaian risiko dalam rangka tujuan instansi pemerintah yaitu memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu kemudian wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Tujuan instansi pemerintah dapat terwujud apabila pimpinan instansi pemerintah menetapkan strategi operasional yang konsisten, strategi manajemen terintegrasi, rencana penilaian risiko, dan tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

c. Kegiatan pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi

instansi pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah.
 2. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko.
 3. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah.
 4. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis.
 5. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis.
 6. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.
- d. Informasi dan komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud wajib diselenggarakan secara efektif, untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya:

1. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi.
2. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

e. Pemantauan pengendalian internal

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian internal. Pemantauan sistem pengendalian internal dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya.

5. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran oleh pemerintah desa. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa merupakan proses pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban serta pengawasan harus benar – benar dapat di laporkan dan di pertanggungjawabkan kepada masyarakat terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban.

Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya pada ayat (2) nya dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah (1) perumusan rencana keuangan, (2) pelaksanaan

dan pembiayaan kegiatan, (3) melakukan evaluasi atas kinerja keuangan, (4) pelaksanaan pelaporan keuangan (Zeyn 2011).

1. Perencanaan

- a. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa dibuat, disampaikan oleh kepala desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- b. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- c. Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Apabila Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka peraturan desa berlaku dengan sendirinya.
- d. Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- e. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa dengan keputusan Bupati/Walikota. Pembatalan peraturan desa tersebut sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran

sebelumnya. Apabila terjadi pembatalan, kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa.

- f. Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
- g. Dalam hal Bupati/Walikota mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain, maka langkah yang dilakukan adalah :
 - 1) Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa.
 - 2) Dalam hal ini camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditetapkan, peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
 - 3) Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
 - 4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, camat menyampaikan usulan pembatalan peraturan desa kepada Bupati/Walikota.

2. Pelaksanaan

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- c. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- d. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- e. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- f. Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa tetap dapat dikeluarkan walaupun rancangan peraturan desa tentang APBDesa belum ditetapkan.
- g. Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen diantaranya Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sebelum digunakan, RAB tersebut diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.
- h. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan

dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.

3. Penatausahaan

- a. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan : Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.
- b. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

4. Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada

Bupati/Walikota yang meliputi

- a. Laporan semester pertama, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa.Semester Pertama.
- b. Laporan semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir.

5. Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran laporan yang meliputi :

- a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
 - 1) Merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- 2) Di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
 - 3) Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
- b. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan
 - c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

6. Hubungan antar Variabel

- a. Hubungan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bahwa pemerintah wajib memberikan dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP sebagai bukti pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa (Mardiasmo, 2009: 159). Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas apabila laporan keuangan yang di sajikan dapat memenuhi informasi yang di butuhkan oleh publik dan para pengambil keputusan (Nordiawan, 2010).

penelitian Wardana Ibnu (2016), menguji pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan hasil

analisisnya menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. hehanussa (2015) menyatakan penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. sedangkan Riyansa, dkk (2015) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas.

b. Hubungan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Aksesibilitas Laporan Keuangan merupakan kemampuan untuk memberi akses bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui atau memperoleh informasi atas laporan keuangan berdasarkan prinsip mudah dan biaya murah. Menyajikan laporan keuangan dengan baik tetapi tidak memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, maka usaha untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan dengan baik.

Pemerintah desa harus memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan. Kemudahan akses yang diberikan bagi para pengguna laporan keuangan, akan memicu terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik. Kemudahan akses laporan keuangan tidak hanya diberikan kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa.

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Akses ini diberikan oleh media seperti surat kabar, majalah, radio,

stasiun televisi, website (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Mulyana, 2006). Hasil penelitian Nitasari (2018) menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. sedangkan Hasil penelitian Randi Tengku Muhammad (2018) dan Ibnu Wardana (2016) mengatakan bahwa Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

c. Hubungan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Pengendalian internal didefinisikan sebagai suatu proses yang di pengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan tertentu, pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi,serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian maupun *fraud* (Afriyanti 2011).

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mendefinisikan sistem pengendalian internal pemerintah ialah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Maka dapat di simpulkan bahwa akuntabilitas dapat terwujud apabila setiap instansi menerapkan sistem pengendalian intern yang tepat, karena dalam sistem pengendalian intern, suatu instansi di haruskan menyajikan laporan keuangan yang dapat di pertanggungjawabkan. Penelitian Ibnu Wardana (2016) menguji pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan pada Desa Kabupaten Magelang yang ternyata memiliki pengaruh yang signifikan, serta penelitian Aramide dan Bashir (2015) mengatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan . Sedangkan Indriya (2013) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

7. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

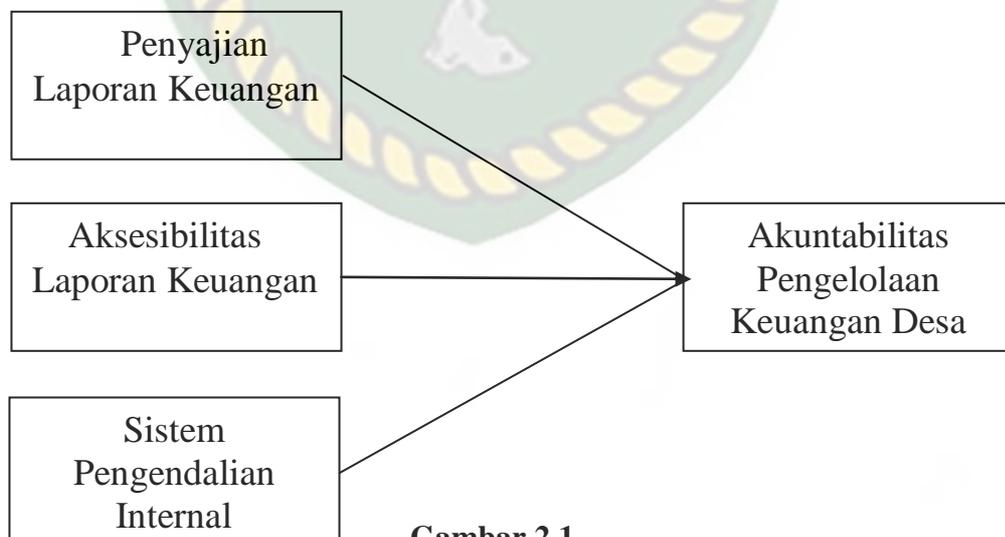
NO	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Putu Sri Wahyuni, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, Nyoman Trisna Herawati (2014)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung	Dependen: -Akuntabilitas Keuangan Daerah Independen: -Penyajian Laporan Keuangan -Aksesibilitas Laporan Keuangan	Berpengaruh Berpengaruh
2	Hehanussa (2015)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon	Dependen: -Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Independen: -Penyajian Laporan Keuangan -Aksesibilitas Laporan Keuangan	Berpengaruh Berpengaruh
3	Sumiyati (2015)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah SKPD Kabupaten	Dependen: -Akuntabilitas Keuangan Daerah Independen: -Penyajian Laporan Keuangan	Berpengaruh

		Rokan Hilir	-Aksesibilitas Laporan Keuangan	Berpengaruh
4	Vini Dwi Tamara (2015)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah Pada SKPD Kota Medan	<p>Dependen: -Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Independen: -Penyajian Laporan Keuangan -Sistem Akuntansi Keuangan Daerah - Sistem Pengendalian Internal</p>	<p>Berpengaruh</p> <p>Berpengaruh</p> <p>Berpengaruh</p>
5	Ibnu Wardana (2016)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan desa Kabupaten Magelang	<p>Dependen: -Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa</p> <p>Independen: -Penyajian Laporan Keuangan -Aksesibilitas Laporan Keuangan -Pengendalian Internal</p>	<p>Berpengaruh</p> <p>Berpengaruh</p> <p>Berpengaruh</p>
6	Nuria Rahma (2017)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah	<p>Dependen: -Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Independen: -Penyajian Laporan Keuangan</p>	Berpengaruh

		SKPD Kabupaten Indragiri Hulu	-Aksesibilitas Laporan Keuangan -Pengendalian Internal	Berpengaruh Berpengaruh
7	Randi Tengku Muhammad (2018)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Kampar	Dependen: -Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Independen: -Penyajian Laporan Keuangan -Aksesibilitas Laporan Keuangan -Pengendalian Internal	Berpengaruh Berpengaruh Berpengaruh

8. Model Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori, dapat digambarkan model penelitian sebagai berikut



Gambar 2.1
Model Penelitian

B. Hipotesis

Berdasarkan Kerangka Pemikiran dan penelitian terdahulu maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut

- H1: Penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
- H2: Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
- H3: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
- H4: Penyajian laporan keuangan, Aksesibilitas laporan keuangan, dan Sistem pengendalian internal secara bersama sama berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di daerah Kabupaten Bengkalis, Objek penelitian ini yaitu pada beberapa kantor desa di Kabupaten Bengkalis

B. Operasional Variabel Penelitian

1. Variabel Independen

Variabel independen (bebas) adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel dependen secara positif atau negatif, Variabel bebas dalam penelitian ini adalah

a. Penyajian laporan Keuangan (x1)

Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjelaskan tentang karakteristik laporan keuangan yaitu ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Terdapat 4 indikator yang digunakan untuk mengukur penyajian laporan keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 yaitu (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, (4) dapat dipahami. Variabel penyajian laporan keuangan ini di ukur dengan instrumen pernyataan Wardana Ibnu (2016) . Pengukuran variabel

digambarkan dalam skala likert (*likert scale*). Skala likert ini menggunakan lima angka penilaian yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Kurang Setuju, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju.

b. Aksesibilitas Laporan Keuangan (x2)

Pemerintah desa harus memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan. Kemudahan akses yang diberikan bagi para pengguna laporan keuangan, akan memicu terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik

Menurut Nurmuthmainnah (2015) terdapat 3 indikator yang digunakan untuk mengukur aksesibilitas adalah kemudahan masyarakat mendapatkan informasi (1) terbuka dimedia massa, (2) mudah diakses, (3) ketersediaan informasi). Pengukuran variabel digambarkan dalam skala likert (*likert scale*). Skala likert ini menggunakan lima angka penilaian yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Kurang Setuju, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju.

c. Sistem Pengendalian Internal (x3)

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mendefinisikan sistem pengendalian internal pemerintah ialah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien.

Terdapat 5 indikator yang digunakan untuk mengukur sistem pengendalian meliputi: (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi dan, (5) pemantauan (PP Nomor 60 Tahun 2008). Variabel sistem pengendalian intern pemerintah ini diukur dengan instrumen pernyataan penelitian Wardana Ibnu (2016). Pengukuran variabel digambarkan dalam skala likert (*likert scale*). Skala likert ini menggunakan lima angka penilaian yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Kurang Setuju, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju.

2. Variabel Dependen

Variabel terikat adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah

a. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas pengelolaan keuangan merupakan proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas keuangan sangat terkait dengan pelaporan keuangan, mulai dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah (1) perumusan rencana keuangan, (2) pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan, (3) melakukan evaluasi atas kinerja keuangan, (4) pelaksanaan pelaporan keuangan (Zeyn 2011). Pengukuran variabel digambarkan dalam skala likert (*likert scale*).

Skala likert ini menggunakan lima angka penilaian yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Kurang Setuju, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi di definisikan sebagai himpunan atau sekumpulan elemen, unsur, atau unit dalam suatu area atau ruang lingkup tertentu, yang memiliki atribut atau karakteristik tertentu, dan ditetapkan oleh penulis sebagai objek analisis penelitian (Wahyudin, 2015: 116). Populasi di dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa di Kabupaten Bengkalis dengan jumlah 126 desa. Teknik pengambilang sampel adalah *insidental sampling*. *Insidental sampling* merupakan teknik pengambilan sampel secara kebetulan (Sugiyono ,2015), dimana sampel yang di dapat oleh peneliti adalah sebanyak 12 sampel dengan jumlah 3 responden dari setiap sampel. Sehingga total responden yang di dapat adalah berjumlah berjumlah 36.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan - pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari staf dan unit pegawai di setiap kantor desa, Data ini di peroleh dari hasil jawaban para responden atas kuesioner yang diajukan dimana responden di perkenankan memberi jawaban dianggap paling sesuai.

E. Teknik dan Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara survei yaitu dengan menyebarkan kuesioner pada beberapa kantor desa tertentu yang ada di kabupaten bengkalis, yang akan diisi oleh kepala dan unit pegawai pada kantor desa . Cara ini adalah cara yang paling efektif untuk mendapatkan data penelitian dengan pertimbangan efisien waktu, biaya, dan keaslian data.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian. Tujuan analisis data adalah mendapatkan informasi relevan yang terkandung didalam data tersebut dan menggunakan *uji regresi linear berganda*, Regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan fungsional antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Penganalisaan data yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan bantuan komputer dengan program *SPSS (Statistical Package For Social Science)*. Persamaan umum analisis regresi linier berganda adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

a = Koefisien Konstanta

b = Koefisien Variabel independen

X1 = Penyajian Laporan Keuangan

X_2 = Aksesibilitas Laporan Keuangan

X_3 = Sistem Pengendalian Internal

e = Error Term

G. Uji Kualitas Data

Metode analisis data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah

1. Uji Validitas Data

Menurut Ghozali (2013: 52-59) Mengukur validitas bisa dilakukan dengan cara melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor variabel. Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r table untuk *degree freedom* (df) = $n-2$, n adalah jumlah sampel, jadi df yang digunakan adalah $36-2 = 34$ dengan *alpha* sebesar 5% maka menghasilkan nilai r table (uji dua sisi) sebesar 0,329 dengan ketentuan

Hasil r hitung $>$ r table (0,329) = valid

Hasil r hitung $<$ r table (0,329) = tidak valid

2. Uji Reliabilitas

Adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali 2013 : 48). Dalam Penelitian ini, Peneliti mengukur reliabel suatu variabel dengan cara melihat *cronbach alpha* dengan signifikansi lebih besar 0,60 suatu variabel dikatakan reliabel jika menunjukkan nilai *cronbach alpha* $>$ 0,60 .

H. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik Sebelum analisis regresi berganda dilakukan, maka harus melaksanakan persyaratan pada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk mengetahui apakah model regresi layak dipakai atas variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Oleh karena itu perlu diadakan beberapa uji yaitu:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan bebas mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali,2013:160) . Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik non-parametrik KolmogorovSmirnov (K-S) yang dipadukan dengan kurva Normal P-P Plots. Uji tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi dari data apakah terdistribusi secara normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan pada uji Kolmogorov-Smirnov (K-S), yaitu:

1. Jika nilai probabilitas nilai signifikansi $> 0,05$ berarti data berdistribusi normal.
2. Jika nilai probabilitas nilai signifikansi $< 0,05$ berarti data tidak berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah keadaan dimana antara dua variabel independen atau lebih pada model regresi terjadi hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna. Multikolinearitas timbul sebagai akibat adanya hubungan

kausal antara dua variabel bebas atau lebih atau adanya kenyataan bahwa dua variabel penjelas atau lebih bersamasama dipengaruhi oleh variabel ketiga yang berada di luar model. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari 10 maka model terbebas dari multikolinieritas. VIF adalah suatu estimasi berapa besar multikolinearitas meningkatkan varian pada suatu koefisien estimasi sebuah variabel penjelas. VIF yang tinggi menunjukkan bahwa multikolinearitas telah menaikkan sedikit varian pada koefisien estimasi, akibatnya menurunkan nilai t .

3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Ghozali 2013:139) Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan varian dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variandari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastitas. Model regresi yang baik adalah yang sifatnya Homoskedastisitas.

Heteroskedastisitas pada umumnya sering terjadi pada model-model yang menggunakan data cross section daripada time series. Namun bukan berarti model-model yang menggunakan data time series bebas dari heteroskedastisitas. Sedangkan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola tertentu pada grafik. Dasar pengambilan keputusannya adalah:

- 1) Jika terdapat pola tertentu, yaitu jika titik-titikya membentuk pola tertentu dan teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terdapat heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak terdapat pola yang jelas, yaitu titik-titiknya menyebar serta di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terdapat heteroskedastisitas.

I. Uji Hipotesis

1. Uji t (Parsial)

Menurut (Ghozali 20013: 98) Statistic t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian menggunakan signifikan level 0.05 ($\alpha=5\%$), dengan pengujian sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka hipotesis di terima (koefisien regresi signifikan). Hal ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis di tolak (koefisien regresi tidak signifikan) hal ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

2. Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh Variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersamaan (Simultan). Uji F dilakukan apakah model pengujian hipotesis yang digunakan tetap. Uji F-test dengan tingkat signifikan p -value 0,000 atau α (5% atau 0,05). Dengan Pengujian sebagai berikut:

- a. Jika $\text{sig} < \alpha$ (5% atau 0,05), maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen
- b. Jika $\text{sig} > \alpha$ (5% atau 0,05), maka variabel independen tidak secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

J. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Nilai R^2 untuk menyatakan koefisien determinasi parsial variabel independen terhadap variabel depende, Besarnya koefisien determinasi adalah 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati nol, maka semakin kecil pula pengaruh semua variabel independent terhadap nilai variabel. Sedangkan jika koefisien determinasi mendekati 1 dapat dikatakan semakin kuat model tersebut dalam menerangkan variasi variabel independen terhadap variabel dependen. Angka dari R square didapat dari pengolahan data melalui program SPSS yang bisa dilihat pada tabel model summery kolom R square.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kabupaten Bengkalis

Bengkalis di resmikan menjadi kabupaten bengkalis berdasarkan undang-undang No. 12 tahun 1956. Wilayah ini masih berada dalam wilayah propinsi sumatera tengah merupakan salah satu kabupaten di provinsi riau dengan luas wilayah 7.793,93 km². Ibukota kabupaten ini berada di bengkalis tepatnya berada di pulau bengkalis yang terpisah dari pulau sumatera. Secara Administrasi Pemerintah, Kabupaten Bengkalis terbagi dalam 8 Kecamatan, 102 Kelurahan/Desa dengan luas wilayah 7.793,93 km². Tercatat jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis 498.335 jiwa dengan sifatnya yang heterogen, mayoritas penduduknya adalah penganut agama Islam. Disamping suku Melayu yang merupakan mayoritas penduduk, juga terdapat suku-suku lainnya seperti: suku Minang, suku Jawa yang mayoritas tinggal di Desa Pedekik, Wonosari, suku Bugis, suku Batak, etnis Tionghoa dan sebagainya.

B. Visi Misi Kabupaten Bengkalis

1. Visi

“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Sebagai Model Negeri Makmur dan Maju di Indonesia (2016-2021)”

Makna yang terkandung dalam visi ini adalah

2. Misi

Misi-1

Terwujudnya pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggungjawab serta melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas

Misi-2

Terwujudnya pengelolaan seluruh potensi dan sumber daya manusia (SDM) untuk kemakmuran rakyat

Misi-3

Terwujudnya penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat

C. Daftar Desa Kabupaten Bengkalis

Tabel 4.1
Daftar Desa

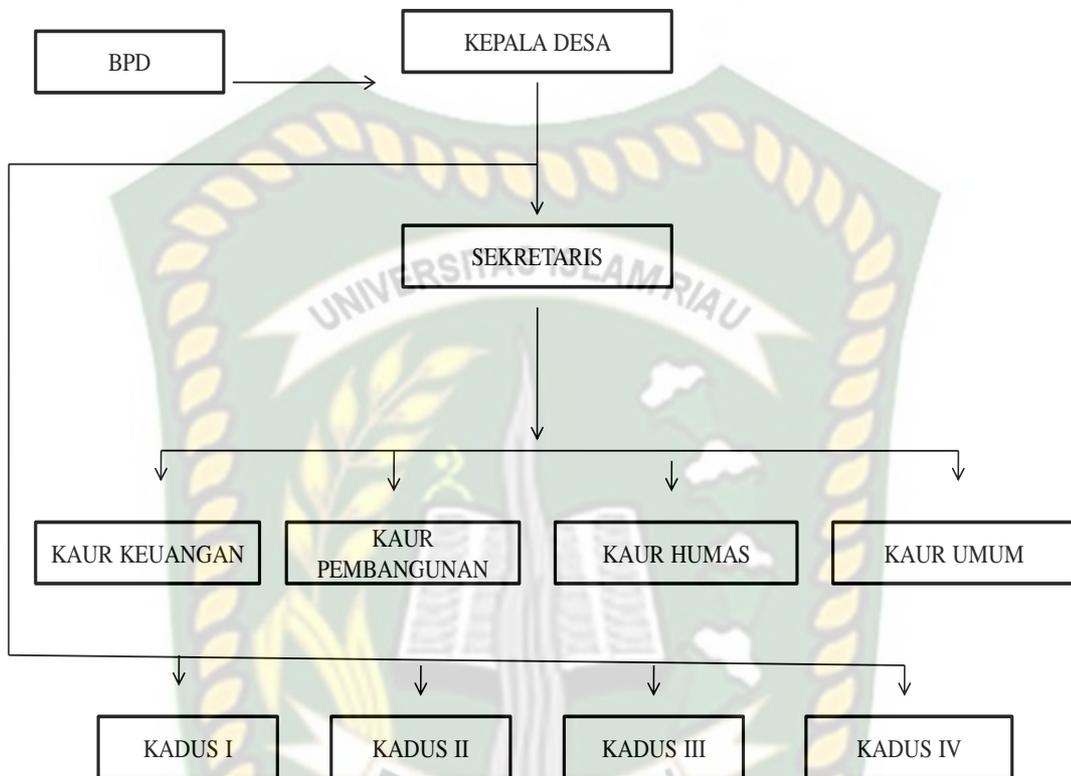
No	Kecamatan	Nama Desa
1	Bengkalis	<ul style="list-style-type: none"> - Air Putih - Kelapapati - Kelemantan - Ketamputih - Meskom - Pangkalan Batang - Pedekik - Pematang Duku - Penampi - Penebal - Rimba Sekampung - Sebauk - Sungai Alam - Sekodi - Teluk Latak - Temeran - Wonosari - Bengkalis Kota - Damon - Senggoro
2	Bantan	- Bantan Air

		<ul style="list-style-type: none"> - Bantan Tengah - Bantan Tua - Jangkang - Kembung Dalam - Kembung Luar - Muntai - Selat Baru - Teluk Lancar - Teluk Pambang
3	Bukit Batu	<ul style="list-style-type: none"> - Api Api - Bukit Batu - Bukit Kerikil - Buruk Bakul - Dompas - Pangkalan Jambi - Parit 1 - Sejangat - Sepahat - Sukajadi - Sungai Pakning - Sungai Selari - Tanjung Leban - Temiang - Tenggayun
4	Siak Kecil	<ul style="list-style-type: none"> - Bandar Jaya - Langkat - Lubuk Garam - Lubuk Gaung - Lubuk Muda - Muara Dua - Sadar Jaya - Sepotong - Sumber Jaya - Sungai Limau - Sungai Siput - Tanjung Belit - Tanjung Damai
5	Mandau	<ul style="list-style-type: none"> - Air Jamban - Babussalam - Balai Makam - Balik Alam - Batang Serosa - Bumbang - Duri Barat - Duri Timur - Gajah Sakti

		<ul style="list-style-type: none"> - Harapan Baru - Pematang Pudu - Petani - Sebangar - Sesumbo Ampai - Talang Mandi
6	Pinggir	<ul style="list-style-type: none"> - Balai Pungut - Balai Raja - Beringin - Kuala Penaso - Melibur - Muara Basung - Pinggir - Semunai - Serai Wangi - Tasik Serai - Tasik Serai Timur - Tenggana - Titian Antui
7	Rupat	<ul style="list-style-type: none"> - Batu Panjang - Darul Alam - Hutan Panjang - Makeruh - Pangkalan Nyirih - Parit Kebumen - Pergam - Sungai Cingam - Sukarjo Mesin - Tanjung Kapal - Teluk Lecah - Terkul
8	Rupat Utara	<ul style="list-style-type: none"> - Kadur - Tanjung Medang - Tanjung Punak - Teluk Ruh - Titi Akar

D. Struktur Organisasi Desa Kabupaten Bengkalis

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Responden

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai data-data deskriptif yang diperoleh dari responden. Data deskriptif yang menggambarkan keadaan atau kondisi responden yang perlu diperhatikan sebagai tambahan untuk memahami hasil-hasil penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah memberikan kuesioner kepada kepala, anggota dan unit pegawai bagian pada kantor desa Bengkalis yang berjumlah 36. Jumlah sampel dan tingkat pengembalian kuesioner pada penelitian ini dirangkum dalam Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1
Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Total kuesioner yang disebar	36	100%
Total kuesioner yang kembali	36	100%
Total kuesioner yang tidak kembali	-	
Total kuesioner yang tidak memenuhi syarat	-	
Total kuesioner yang dapat diolah	36	100%

Sumber: Data Olahan, 2019

Responden dalam penelitian ini kepala, anggota, dan unit pegawai bagian pada kantor desa Kabupaten Bengkalis. Alat penelitian ini menggunakan kuesioner, dengan responden berjumlah 36 responden. Berikut ini adalah deskripsi mengenai karakteristik responden penelitian yang terdiri dari jenis kelamin, tingkat pendidikan, masa kerja jabatan dan usia.

Tabel 5.2
Deskriptif Responden

Data Responden	Keterangan	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Laki – Laki	21	58,3%
	Perempuan	15	41,7%
Usia	20-30	15	41,7%
	31-40	18	50%
	41-50	3	8,3%
Tingkat Pendidikan	SMA	17	47,2%
	D3	6	16,7%
	S1	13	36,1%
Jabatan	Kades	3	8.3%
	Sekdes	6	16,7%
	Kaur	11	30.6%
	Kasi	9	25%
	Kadus	7	19.4%
Masa Kerja	<1 thn	3	8,3%
	1-5 thn	15	41,7%
	5-10 thn	8	22,2%
	>10 thn	10	27,8

Sumber: Data Olahan, 2019

Tabel 5.2 diatas menunjukkan bahwa responden yang mengisi kuesioner berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 21 responden dengan persentase 58,3%, dan berdasarkan jenis kelamin perempuan sebanyak 15 responden dengan persentase 41,7%. Pada responden yang mengisi kuesioner berdasarkan pendidikan terakhir SMA sederajat sebanyak 17 responden dengan persentase 47,2%, berdasarkan pendidikan terakhir D3 sebanyak 6 responden dengan persentase 16,7%, dan berdasarkan pendidikan terakhir S1 sebanyak 13 responden dengan persentase 36,1%. Pada responden yang mengisi kuesioner berdasarkan umur antara 20-30 tahun sebanyak 15 responden dengan persentase 41,7%,

berdasarkan umur antara 31-40 tahun sebanyak 18 responden dengan persentase 50%, dan berdasarkan umur antara 41-50 tahun sebanyak 3 responden dengan persentase 8,3%. Berdasarkan jabatan, staf kaur yang paling banyak menjadi responden dengan persentase 30,6% sedangkan berdasarkan masa kerja, 1-5 tahun adalah yang paling banyak menjadi responden sebesar 41,7 %.

B. Statistik Deskriptif

Menurut Ghazali (2013:19) statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi. Untuk memberikan gambaran analisis deskriptif berikut akan dijelaskan pada Tabel 5.3 sebagai berikut:

Tabel 5.3
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PLK	36	24	37	29.64	4.428
ALK	36	8	15	10.92	1.991
SPI	36	26	45	33.19	4.646
Akuntabilitas	36	48	85	62.75	9.726
Valid N (listwise)	36				

Sumber : Data Olahan SPSS 25, 2019

Berdasarkan Tabel 5.3 pada variabel penyajian laporan keuangan (X_1) menunjukkan nilai terendah sebesar 24, nilai tertinggi 37, nilai rata-rata sebesar 29,64, dan nilai standar deviasi sebesar 4,428. Artinya penyajian laporan keuangan dikategorikan tinggi apabila nilainya lebih dari 29,64. Pada variabel aksesibilitas laporan keuangan (X_2) menunjukkan nilai terendah sebesar 8, nilai tertinggi 15, nilai rata-rata sebesar 10,92, dan nilai standar deviasi sebesar 1,991. Artinya aksesibilitas laporan keuangan dikategorikan tinggi apabila nilainya lebih

dari 10,92. Pada variabel sistem pengendalian internal (X_3) menunjukkan nilai terendah sebesar 26, nilai tertinggi 45, nilai rata-rata sebesar 33,19, dan nilai standar deviasi sebesar 4,646. Artinya sistem pengendalian internal di kategorikan tinggi apabila nilainya lebih dari 33,19. Pada variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y) menunjukkan nilai terendah sebesar 48, nilai tertinggi 85, nilai rata-rata sebesar 62,75, dan nilai standar deviasi sebesar 9,726. Artinya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kategorikan tinggi apabila nilainya lebih dari 62,75.

C. Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner akan dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut, Imam Ghozali (2013:53). Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan uji korelasi *Pearson Product Moment* dengan ketentuan nilai $r_{hitung} >$ nilai r_{tabel} maka item pertanyaan dikatakan valid. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$, dalam hal ini n adalah jumlah sampel, Imam Ghozali (2013:54). Untuk mencari nilai r tabel dapat menggunakan rumus *degree of freedom* (df) = $n-2$. Dalam penelitian ini terdapat jumlah sampel sebanyak 36 responden, sehingga diperoleh nilai r tabel = $(0,05;df) \Rightarrow (df)= 36-2= 34 \Rightarrow r\text{-tabel} = (0,05;34) = 0,3291$. Diketahui nilai r tabel pada df 34 pada tingkat signifikansi 0,05 adalah sebesar 0,3291. Berikut hasil uji validitas pada setiap masing-masing variabel:

1.1 Uji Validitas Penyajian Laporan Keuangan (X_1)

Pernyataan yang disajikan dalam kuesioner pada variabel penyajian laporan keuangan ada 8 pernyataan. Penyebaran kuesioner dilakukan kepada kepala dan unit pegawai pada kantor desa Bengkalis, berikut rekapitulasi hasil uji validitas untuk variabel penyajian laporan keuangan:

Tabel 5.4
Rekapitulasi Uji Validitas Variabel Penyajian Laporan Keuangan

Butir Pernyataan	Kriteria r_{tabel}	<i>Pearson Correlation</i> (r-hitung)	Keterangan
1	0,3291	0,756	Valid
2	0,3291	0,744	Valid
3	0,3291	0,824	Valid
4	0,3291	0,773	Valid
5	0,3291	0,666	Valid
6	0,3291	0,824	Valid
7	0,3291	0,756	Valid
8	0,3291	0,659	Valid

Sumber: Data Olahan, 2019

Berdasarkan Tabel 5.4 diatas terlihat bahwa masing-masing butir pernyataan untuk variabel penyajian laporan keuangan masing-masing memiliki nilai *pearson correlation* lebih besar dari kriteria r-tabel yang sebesar 0,3291. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara statistik masing-masing butir pernyataan untuk variabel penyajian laporan keuangan valid dan layak untuk digunakan sebagai data penelitian.

1.2 Uji Validitas Aksesibilitas Laporan Keuangan (X_2)

Pernyataan yang disajikan dalam kuesioner pada variabel aksesibilitas laporan keuangan ada 3 pernyataan. Penyebaran kuesioner dilakukan kepada

kepala dan unit pegawai pada kantor desa Bengkalis, berikut rekapitulasi hasil uji validitas untuk variabel aksesibilitas laporan keuangan:

Tabel 5.5
Rekapitulasi Uji Validitas Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan

Butir Pernyataan	Kriteria r_{tabel}	Pearson Correlation (r_{-hitung})	Keterangan
1	0,3291	0,845	Valid
2	0,3291	0,786	Valid
3	0,3291	0,838	Valid

Sumber: Data Olahan, 2019

Berdasarkan Tabel 5.5 diatas terlihat bahwa masing-masing butir pernyataan untuk variabel aksesibilitas laporan keuangan masing-masing memiliki nilai *pearson correlation* lebih besar dari kriteria r-tabel yang sebesar 0,3291. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara statistik masing-masing butir pernyataan untuk variabel aksesibilitas laporan keuangan valid dan layak untuk digunakan sebagai data penelitian.

1.3 Uji Validitas Sistem Pengendalian Internal (X₃)

Pernyataan yang disajikan dalam kuesioner pada variabel sistem pengendalian internal ada 9 pernyataan. Penyebaran kuesioner dilakukan kepada kepala dan unit pegawai pada kantor desa Bengkalis, berikut rekapitulasi hasil uji validitas untuk variabel sistem pengendalian internal:

Tabel 5.6
Rekapitulasi Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Internal

Butir Pernyataan	Kriteria r_{tabel}	<i>Pearson Correlation</i> (r-hitung)	Keterangan
1	0,3291	0,662	Valid
2	0,3291	0,637	Valid
3	0,3291	0,775	Valid
4	0,3291	0,664	Valid
5	0,3291	0,669	Valid
6	0,3291	0,693	Valid
7	0,3291	0,830	Valid
8	0,3291	0,680	Valid
9	0,3291	0,718	Valid

Sumber: Data Olahan, 2019

Berdasarkan Tabel 5.6 diatas terlihat bahwa masing-masing butir pernyataan untuk variabel sistem pengendalian internal masing-masing memiliki nilai *pearson correlation* lebih besar dari kriteria r-tabel yang sebesar 0,3291. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara statistik masing-masing butir pernyataan untuk variabel sistem pengendalian internal valid dan layak untuk digunakan sebagai data penelitian.

1.4 Uji Validitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)

Pernyataan yang disajikan dalam kuesioner pada variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa ada 10 pernyataan. Penyebaran kuesioner dilakukan kepada kepala dan unit pegawai pada kantor desa Bengkalis, berikut rekapitulasi hasil uji validitas untuk variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa:

Tabel 5.7
Rekapitulasi Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Butir Pernyataan	Kriteria r-tabel	<i>Pearson Correlation</i> (r-hitung)	Keterangan
1	0,3291	0,528	Valid
2	0,3291	0,592	Valid
3	0,3291	0,766	Valid
4	0,3291	0,673	Valid
5	0,3291	0,787	Valid
6	0,3291	0,831	Valid
7	0,3291	0,877	Valid
8	0,3291	0,774	Valid
9	0,3291	0,784	Valid
10	0,3291	0,817	Valid
11	0,3291	0,673	Valid
12	0,3291	0,745	Valid
13	0,3291	0,789	Valid
14	0,3291	0,877	Valid
15	0,3291	0,757	Valid
16	0,3291	0,800	Valid
17	0,3291	0,832	Valid

Sumber: Data Olahan, 2019

Berdasarkan Tabel 5.7 diatas terlihat bahwa masing-masing butir pernyataan untuk variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa masing-masing memiliki nilai *pearson correlation* lebih besar dari kriteria r-tabel yang sebesar 0,3291. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara statistik masing-masing butir pernyataan untuk variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa valid dan layak untuk digunakan sebagai data penelitian.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban responden terhadap pernyataan adalah

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu variabel dikatakan handal (*reliabel*) jika memiliki koefisien *cronbach alpha* lebih dari 0,60 (Ghozali, 2013:48). Hasil uji realibilitas disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.8
Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	Kriteria	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	17	0,60	0,954	Reliabel
Penyajian Laporan Keuangan	8	0,60	0,887	Reliabel
Aksesibilitas Laporan Keuangan	3	0,60	0,759	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal	9	0,60	0,867	Reliabel

Sumber: Data Olahan, 2019

Berdasarkan Tabel 5.8 terlihat bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa mempunyai nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,954, variabel penyajian laporan keuangan mempunyai nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,887, variabel aksesibilitas laporan keuangan mempunyai nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,759, dan variabel sistem pengendalian internal mempunyai nilai *cronbach's alpha* sebesar 0,867. Nilai kriteria uji reliabilitas yaitu 0,60, sedangkan nilai *cronbach alpha* masing-masing variabel memiliki nilai lebih besar dari kriteria yang sebesar 0,60, maka dapat dikatakan semua variabel reliabel dan layak digunakan sebagai penelitian.

D. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan bebas mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali,2013:160). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov Smirnov (K-S) yang dipadukan dengan kurva Normal P-P Plots. Berikut hasil uji normalitas *kolmogorov smirnov*:

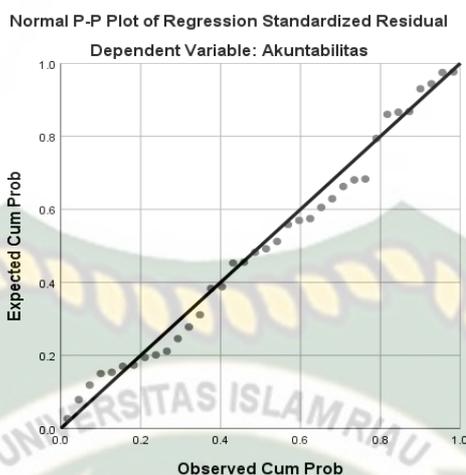
Tabel 5.9
Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	6.42671847
Most Extreme Differences	Absolute	.087
	Positive	.087
	Negative	-.065
Test Statistic		.087
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Data Olahan SPSS 25, 2019

Berdasarkan Tabel 5.9 nilai *kolmogorov-smirnov* adalah sebesar 0,087 dengan nilai signifikan sebesar 0,200. Nilai signifikan 0,200 lebih besar dari α 0,05, artinya data berdistribusi normal. Hasil ini sejalan juga dengan kurva normal P-P Plot dengan membandingkan data observasi distribusi yang mendekati normal, seperti dalam distribusi normal atau mengikuti pola garis diagonal.

Gambar 5.1
Uji Normalitas P-P Plot



Sumber: Data Olahan SPSS 25, 2019

Pada Gambar 5.1 hasil uji normalitas pada *Normal P-P Plot* menunjukkan sebaran data tersebar disekitar garis diagonal atau tidak terpencar jauh dari garis diagonal maka dikatakan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antara variabel independen dalam model regresi (Ghozali: 2013:105). Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Jika nilai *tolerance* $> 0,1$ dan VIF < 10 , maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat dari tabel 5.10 berikut :

Tabel 5.10
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-1.204	10.230		-.118	.907		
PLK	.611	.275	.278	2.221	.034	.869	1.150
ALK	1.326	.639	.271	2.074	.046	.796	1.256
SPI	.945	.292	.451	3.240	.003	.703	1.423

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Sumber: Data Olahan SPSS 25, 2019

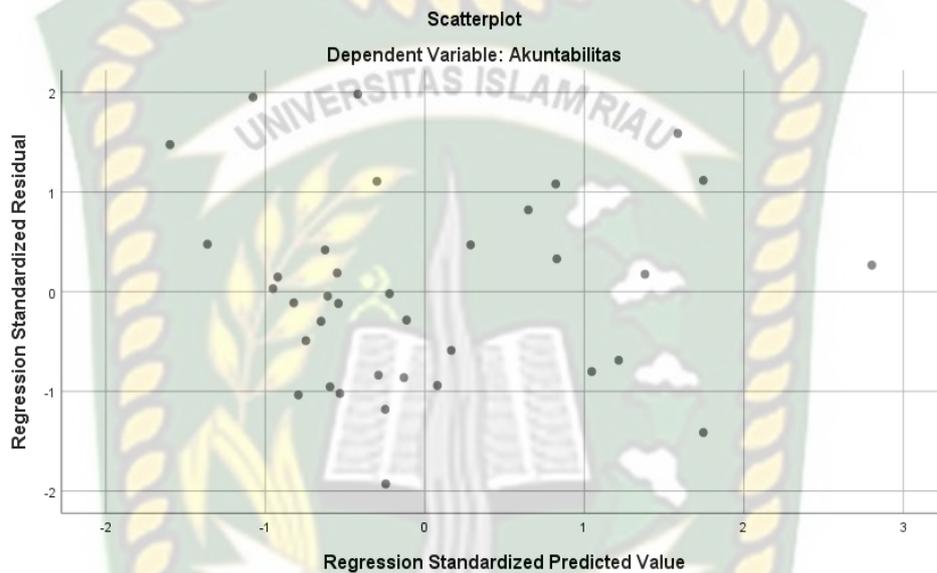
Dari Tabel 5.10 diatas dapat dilihat bahwa nilai *variance inflation factor* (VIF) dari model analisis pada penelitian ini berada kurang dari angka 10, yaitu penyajian laporan keuangan (X_1) memiliki VIF sebesar 1,150, aksesibilitas laporan keuangan (X_2) memiliki VIF sebesar 1,256, dan sistem pengendalian internal (X_3) memiliki VIF sebesar 1,423. Sedangkan pada nilai *tolerance* semua variabel lebih besar dari 0,1, yaitu penyajian laporan keuangan (X_1) memiliki *tolerance* sebesar 0,869, aksesibilitas laporan keuangan (X_2) memiliki *tolerance* sebesar 0,796, dan sistem pengendalian internal (X_3) memiliki *tolerance* sebesar 0,703. Dari ketentuan yang telah disebutkan di atas, telah diketahui nilai VIF dan *tolerance* masing-masing variabel dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresinya.

3. Uji Heterokedastisitas

Menurut (Ghozali 2013:139) Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan varian dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variandari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda

disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang sifatnya Homoskedastisitas. Cara menilai heteroskedastisitas adalah dengan melihat sebaran data, jika tidak terdapat pola yang jelas yaitu titik-titiknya menyebar serta di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terdapat heteroskedastisitas.

Gambar 5.2
Uji Heterokedastisitas Grafik *Scatterplot*



Sumber: Data Olahan SPSS 25, 2019

Pada Gambar 5.2 di atas, dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga berdasarkan ketentuan yang telah dijelaskan di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data penulisan menggunakan metode regresi linear berganda, yaitu suatu metode statistik yang digunakan untuk mengetahui

hubungan antar variabel bebas, dan digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan terkait. Analisis regresi linear berganda memberikan kemudahan bagi pengguna untuk memasukkan lebih dari satu variabel yang ditujukan dengan persamaan:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Tabel 5.11
Hasil Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.204	10.230		-.118	.907
PLK	.611	.275	.278	2.221	.034
ALK	1.326	.639	.271	2.074	.046
SPI	.945	.292	.451	3.240	.003

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Sumber: Data Olahan SPSS 25, 2019

Pada Tabel 5.11 diinterpretasikan adalah nilai dalam kolom B, baris pertama menunjukkan konstanta (a) dan baris selanjutnya menunjukkan variabel independen. Dengan melihat tabel diatas dapat disusun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = -1,204 + 0,611X_1 + 1,326X_2 + 0,945X_3 + e$$

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar -1,204 artinya menyatakan bahwa jika variabel independen tetap maka variabel dependen (Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa) adalah sebesar -1,204.
- Koefisien regresi variabel penyajian laporan keuangan (X_1) adalah sebesar 0,611 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan penyajian

laporan keuangan mengalami kenaikan 1 dalam satuan, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan desa akan mengalami kenaikan sebesar 0,611. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara penyajian laporan keuangan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

- c) Koefisien regresi variabel aksesibilitas laporan keuangan (X_2) adalah sebesar 1,326 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan penyajian aksesibilitas keuangan mengalami kenaikan 1 dalam satuan, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan desa akan mengalami kenaikan sebesar 1,326. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara aksesibilitas laporan keuangan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
- d) Koefisien regresi variabel sistem pengendalian internal (X_3) adalah sebesar 0,945 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan sistem pengendalian internal mengalami kenaikan 1 dalam satuan, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan desa akan mengalami kenaikan sebesar 0,945. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara sistem pengendalian internal dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

F. Pengujian Hipotesis

1. Uji Parsial (t-Test)

Menurut Ghozali (2013:98) statistic t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian menggunakan signifikan level 0.05 ($\alpha=5\%$), dengan pengujian jika nilai signifikan $<0,05$ maka hipotesis di terima

(koefisien regresi signifikan). Tetapi apabila nilai signifikan $>0,05$ maka hipotesis di tolak (koefisien regresi tidak signifikan) hal ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 5.12
Hasil Uji Parsial (t-Test)

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.204	10.230		-.118	.907
PLK	.611	.275	.278	2.221	.034
ALK	1.326	.639	.271	2.074	.046
SPI	.945	.292	.451	3.240	.003

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Sumber: Data Olahan SPSS 25, 2019

a. Hasil Uji Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama (H_1) yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana pengaruh penyajian laporan keuangan (X_1) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y). Pada Tabel 5.12 penyajian laporan keuangan memiliki nilai signifikan sebesar 0,034 lebih rendah dari α 0,05. Artinya hasil pada hipotesis pertama menunjukkan penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, maka dapat disimpulkan hasil pada hipotesis pertama yang menyatakan penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diterima.

b. Hasil Uji Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua (H_2) yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana pengaruh aksesibilitas laporan keuangan (X_1) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y). Pada Tabel 5.12 aksesibilitas laporan keuangan memiliki nilai signifikan sebesar 0,046 lebih rendah dari α 0,05. Artinya hasil pada hipotesis kedua menunjukkan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, maka dapat disimpulkan hasil pada hipotesis kedua yang menyatakan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diterima.

c. Hasil Uji Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga (H_3) yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal (X_3) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y). Pada Tabel 5.12 sistem pengendalian internal memiliki nilai signifikan sebesar 0,003 lebih rendah dari α 0,05. Artinya hasil pada hipotesis ketiga menunjukkan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, maka dapat disimpulkan hasil pada hipotesis ketiga yang menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diterima.

2. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersamaan (simultan). Untuk mengetahui pengaruh

variabel bebas bersama-sama terhadap variabel terkait digunakan uji F yaitu dengan cara membandingkan nilai signifikan dengan α 0,05. Apakah signifikan $<$ α 0,05 maka variabel-variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat.

Tabel 5.13
Hasil Uji Simultan (F-Test)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1865.155	3	621.718	13.762	.000 ^b
	Residual	1445.595	32	45.175		
	Total	3310.750	35			
a. Dependent Variable: Akuntabilitas						
b. Predictors: (Constant), SPI, PLK, ALK						

Sumber: Data Olahan SPSS 25, 2019

Berdasarkan Tabel 5.13 hasil nilai signifikan sebesar 0,000 lebih rendah dari α 0,05. Hasil tersebut menjelaskan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen. Maka dapat dinyatakan penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Tabel 5.14
Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Nilai Signifikansi	Hasil Pengujian
1	0,034	Berpengaruh
2	0,046	Berpengaruh
3	0,003	Berpengaruh
4	0,000	Berpengaruh

G. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali,2013:97). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi = 1, artinya variabel independen memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen. Jika koefisien Determinasi (R^2) = 0, artinya variabel independen tidak mampu menjelaskan pengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 5.15
Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.751 ^a	.563	.522	6.721
a. Predictors: (Constant), SPI, PLK, ALK				
b. Dependent Variable: Akuntabilitas				

Sumber: Data Olahan SPSS 25, 2019

Pada Tabel 5.15 menunjukkan nilai *R-squared* 0,563, angka ini akan diubah kebentuk persen menjadi 56,3%, yang artinya persentase variabel independen secara bersama-sama dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 56,3%. Sedangkan sisanya 43,7% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diukur dalam model regresi ini.

H. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Hipotesis pertama yang diajukan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan adanya hubungan positif antara penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan nilai koefisien 0,611. Hasil uji parsial menunjukkan nilai t-hitung penyajian laporan keuangan sebesar 2,221 lebih besar dari nilai t-tabel yang memiliki nilai sebesar 1,980, untuk nilai signifikan penyajian laporan keuangan memiliki nilai sebesar 0,034 lebih rendah dari taraf signifikan sebesar 0,05. Artinya penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil tersebut hipotesis pertama yang menyatakan penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diterima.

Hasil ini menjelaskan bahwa semakin baik penyajian laporan keuangan desa, maka semakin baik juga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Menurut Mardiasmo (2009:159) dengan adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bahwa pemerintah wajib memberikan dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP sebagai bukti pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas apabila laporan keuangan yang di sajikan dapat

memenuhi informasi yang di butuhkan oleh publik dan para pengambil keputusan (Nordiawan, 2010).

Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Wardana Ibnu (2016) menguji pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan hasil analisisnya terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Serta sejalan dengan penelitian Hehanussa (2015) yang menguji pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada pegawai pemerintah daerah. Sedangkan hasil ini juga tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Riyansa, dkk (2015) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil ini menjelaskan bahwa semakin baik aksesibilitas laporan keuangan desa, maka semakin baik juga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa harus memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, kemudahan akses yang diberikan bagi para pengguna laporan keuangan akan memicu terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik. Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Menurut Mulyana (2006) akses yang diberikan dapat berupa media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, website (internet), dan forum yang

memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat.

Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian dari Randi Tengku Muhammad (2018) dan Wardana Ibnu (2016) yang mengatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Serta penelitian yang menurut Yusrianti dkk (2013) aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan hasil ini juga tidak sejalan dengan dari hasil penelitian dari Nitasari (2018) yang menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil ini menjelaskan bahwa semakin baik sistem pengendalian internal, maka semakin baik juga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Apabila sistem pengendalian internal dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, maka akan memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Hasibuan (2018) tujuan dari sistem pengendalian internal adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pengendalian internal yang baik akan

membuat pengelolaan keuangan menjadi lebih dapat dipercaya, serta kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang terpenuhi.

Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian dari Ibnu Wardana (2016), dan Iclas Dkk (2014) mengatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Juga Menurut Aramide dan Bashir (2015) yang menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Sedangkan hasil ini juga tidak sejalan dari hasil penelitian dari Indriya (2013) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

4. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil ini menjelaskan bahwa semakin baik desa dalam menerapkan penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian internal secara bersama sama maka akan tercipta akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang baik. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan Randi tengku Muhammad (2018) dan Wardana ibnu (2016) yang menyatakan penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Kabupten Bengkalis. Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Nilai signifikan penyajian laporan keuangan memiliki nilai sebesar 0,034 lebih rendah dari α 0,05. Hasil ini menerima hipotesis pertama.
2. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Nilai signifikan aksesibilitas laporan keuangan memiliki nilai sebesar 0,046 lebih rendah dari α 0,05. Hasil ini menerima hipotesis kedua.
3. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Nilai signifikan sistem pengendalian internal memiliki nilai sebesar 0,003 lebih rendah dari α 0,05. Hasil ini menerima hipotesis ketiga.
4. Penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan secara simultan terhadap

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Nilai signifikan sebesar 0,000 lebih rendah dari α 0,05.

5. Hasil koefisien determinasi pada penelitian ini menunjukkan nilai *r-square* sebesar 0,563, yang artinya persentase variabel independen secara bersama-sama dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 56,3%. Sedangkan sisanya 43,7% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diukur dalam model regresi ini.

B. Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melengkapi keterbatasan penelitian dengan mengembangkan beberapa hal yaitu:

1. Perlu mempertimbangkan model berbeda yang akan digunakan dalam penelitian.
2. Disarankan bagi penelitian selanjutnya menambahkan jumlah variabel yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, hal ini didasari dikarenakan nilai determinasi pada penelitian ini sebesar 56,3% yang artinya sebesar nilai tersebutlah variabel independen yang digunakan dapat menjelaskan variasi variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Masih ada tersisa 43,7% faktor-faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Menurut penelitian terdahulu ada beberapa faktor seperti determinan transparansi, pengawasan keuangan, dll.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliya Dan Nahar. 2012. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi & Auditing*. 8(2): 97-189.
- Hehanussa, Salomi j. 2015. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia Maluku*.
- Lestari, Dewi, Atmadja dan Adiputra. 2014. Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif pada Organisasi Publik Non Pemerintahan). *E-Journal SI Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*. 2(1).
- Manopo, Delviyanti Cristin. 2015. Pelaksanaan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Studi didesa Warisa, Kecamatan Talawan Kabupaten Minahasa Utara).
- Mustofa, Anies Iqbal. 2012. Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang. *Accounting Analysis Journal*. ISSN 2252-6765. Universitas Negeri Semarang.
- Nordiawan, Deddi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Nurmuthmainnah, Wahida. 2015. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.
- Nurmuthmainnah, Wahida. 2015. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar

- Rahma, Nuria. 2017. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Penelitian pada SKPD kabupaten Indragiri Hulu)
- Ramon, Dolly. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Keuangan (Studi Empiris Pada Inspektorat Kota Se Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta*.
- Randi, Tengku Muhammad. 2018. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Kampar. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau*
- Riyansa, Ridho, Yunilma dan Fauziati Poppy. 2015. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta*.
- Sande, Peggy. 2013. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat). *Skripsi*. Padang:Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Sujarweni, V.Wiratna. 2015. Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Wahyuni, Putu Sri, Sulindawati, Ni Luh Gede Erni, dan Herawati Nyoman Trisna. 2014. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten Badung). *Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI*. 2(1).
- Wardana, Ibnu. 2016. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Magelang

Zyen, Elvira. 2011. Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan. *Trikonomika*, 10(1): 52-62.

Ikatan Akuntan Indonesia-KSAP. 2015. Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 2014

Peraturan Pemerintah No. 22 Pasal 29 tentang Pembagian Dana Desa. 2015

Peraturan Pemerintah No.71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). 2010

Peraturan Pemerintah No. 43 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa. 2014

Undang-Undang No.6 tentang Desa. 2014

